

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN TANTANGAN PENINGKATAN
KUALITAS PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DASAR
DALAM PERSPEKTIF HISTORIS**

Mufidatur Rizqiya Permana¹, Erma Fatmawati², Imron Fauzi³
¹²³PGMI Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Alamat e-mail : 1workspacefifi@gmail.com,

Alamat e-mail : 2ermafatmawati@uinkhas.ac.id,

Alamat e-mail : 3imronfauzi@uinkhas.ac.id,

ABSTRACT

Education is a strategic instrument in shaping civilization and national progress. Throughout its history, national education policy in Indonesia has undergone continuous changes that reflect the social, political, and cultural dynamics of each administration. These changes have direct implications for the direction and quality of learning, especially in elementary schools as the foundation of national education. This study aims to analyze the development of Indonesia's national education policy from a historical perspective and identify challenges in improving the quality of basic learning. The study uses a qualitative approach with a historical-descriptive literature study method, through an analysis of policies, official documents, and previous research results. The results show that each period has different policy characteristics: the colonial period emphasized discriminatory education, the Old Order emphasized national identity, the New Order was oriented towards stability and equity, while the Reformation to Merdeka Belajar (Freedom of Learning) emphasized decentralization and competency-based quality improvement. However, these policies still face challenges such as quality gaps, limited teacher resources, and infrastructure. In conclusion, changes in national education policy show a continuous direction towards improving the quality of basic learning, although its implementation is not yet evenly distributed across all regions.

Keywords: National education policy, History of education, Historical studies

ABSTRAK

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam membentuk peradaban dan kemajuan bangsa. Sepanjang sejarahnya, kebijakan pendidikan nasional di Indonesia terus mengalami perubahan yang mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya setiap masa pemerintahan. Perubahan tersebut berimplikasi langsung terhadap arah dan kualitas pembelajaran, terutama di sekolah dasar sebagai fondasi pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan kebijakan pendidikan nasional Indonesia dalam perspektif historis serta

mengidentifikasi tantangan dalam peningkatan kualitas pembelajaran dasar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur historis-deskriptif, melalui telaah terhadap kebijakan, dokumen resmi, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap periode memiliki karakteristik kebijakan berbeda: masa kolonial menekankan pendidikan diskriminatif, Orde Lama menegaskan identitas nasional, Orde Baru berorientasi pada stabilitas dan pemerataan, sedangkan Reformasi hingga Merdeka Belajar menitikberatkan pada desentralisasi dan peningkatan mutu berbasis kompetensi. Namun, kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan kesenjangan mutu, keterbatasan sumber daya guru, dan sarana prasarana. Kesimpulannya, perubahan kebijakan pendidikan nasional menunjukkan kesinambungan arah menuju perbaikan mutu pembelajaran dasar, meskipun implementasinya belum merata di seluruh daerah.

Kata Kunci: Kebijakan pendidikan nasional, Sejarah pendidikan, Studi historis

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Menurut (Daud, 2024), pendidikan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan budaya suatu bangsa karena kebijakan pendidikan selalu mencerminkan arah dan cita-cita nasional. Dalam kerangka itu, kebijakan pendidikan nasional menjadi sarana strategis untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam perspektif historis, kebijakan pendidikan Indonesia

mengalami perubahan signifikan seiring dengan dinamika sosial-politik yang melingkupinya. Sejarah panjang pendidikan nasional menunjukkan bahwa setiap periode pemerintahan mulai dari masa kolonial hingga era reformasi membawa arah kebijakan yang berbeda dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Kualitas pembelajaran di sekolah dasar menjadi fokus utama karena merupakan fondasi bagi keberhasilan pendidikan selanjutnya.

Kebijakan pendidikan nasional memiliki dasar hukum yang kuat. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan utama penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pendidikan, yang menegaskan prinsip desentralisasi pendidikan.

Kebijakan lain yang relevan antara lain Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah dan berbagai regulasi dalam program Merdeka Belajar, yang menandai upaya pemerintah untuk memperkuat otonomi satuan pendidikan serta mendorong inovasi pembelajaran di sekolah dasar. Secara historis, setiap kebijakan tersebut menjadi bagian dari proses panjang reformasi pendidikan nasional (Nur Fauziah et al., n.d.).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pendidikan membawa pengaruh terhadap penyelenggaraan pembelajaran di sekolah dasar. Penelitian oleh (Suyana et al., 2024) mengungkap bahwa perubahan kurikulum dari waktu ke waktu mencerminkan upaya penyesuaian terhadap kebutuhan zaman, meski implementasinya kerap menghadapi kendala di lapangan. Sementara itu, studi oleh (Tawa, 2019) menunjukkan bahwa kebijakan Merdeka Belajar

memberi ruang bagi sekolah untuk berinovasi, namun masih dihadapkan pada tantangan kesenjangan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Hasil penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan pendidikan nasional di Indonesia selalu mengalami transformasi, tetapi peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dasar belum sepenuhnya tercapai secara merata.

Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada analisis implementasi kebijakan atau dampak kurikulum tertentu terhadap hasil belajar, tanpa meninjau secara komprehensif perjalanan historis kebijakan pendidikan nasional dan tantangannya terhadap mutu pembelajaran dasar dari masa ke masa (Rifa'i, 2011). Masih sedikit kajian yang mengaitkan konteks historis kebijakan dengan tantangan aktual dalam penyelenggaraan pembelajaran di sekolah dasar. Oleh karena itu, diperlukan analisis historis yang lebih luas untuk memahami pola perubahan dan kontinuitas kebijakan pendidikan nasional serta implikasinya terhadap peningkatan kualitas pendidikan dasar.

Penelitian ini menarik karena pemetaan historis kebijakan

pendidikan nasional Indonesia secara lintas periode dari masa kolonial hingga era Merdeka Belajar dan analisis tantangan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dasar yang menyertainya (Nasution, n.d.). Pendekatan historis-deskriptif ini tidak hanya memotret perkembangan kebijakan, tetapi juga mengungkap keterkaitan antara arah kebijakan masa lalu dengan dinamika kebijakan kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif reflektif yang dapat menjadi dasar bagi evaluasi dan perumusan kebijakan pendidikan ke depan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan kebijakan pendidikan nasional di Indonesia dalam perspektif historis. Menganalisis tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dasar sebagai akibat dari dinamika perubahan kebijakan tersebut. Mengidentifikasi relevansi pengalaman historis kebijakan pendidikan terhadap arah pengembangan kebijakan pendidikan masa kini dan masa depan.

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, artikel ini diarahkan untuk memberikan

gambaran menyeluruh mengenai dinamika kebijakan pendidikan nasional Indonesia dari masa ke masa serta implikasinya terhadap kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Melalui kajian literatur dan analisis historis-deskriptif, diharapkan artikel ini dapat memperkaya pemahaman tentang hubungan antara kebijakan pendidikan dan mutu pembelajaran dasar, sekaligus menjadi bahan refleksi dalam perumusan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif dan berkelanjutan di masa mendatang.

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (*library research*) yang bersifat historis-deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis dan interpretasi terhadap perkembangan kebijakan pendidikan nasional Indonesia dari masa ke masa serta implikasinya terhadap kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Melalui pendekatan historis, peneliti menelusuri perjalanan kebijakan pendidikan secara kronologis dan menafsirkan dinamika perubahan yang terjadi berdasarkan konteks

sosial, politik, dan pendidikan yang melingkupinya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Sumber primer, yaitu dokumen resmi kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan termasuk kebijakan Merdeka Belajar .
- b. Sumber sekunder, meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, laporan penelitian, serta hasil kajian akademik yang relevan dengan kebijakan pendidikan nasional dan pembelajaran di sekolah dasar .

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan telaah pustaka mendalam terhadap literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan kegiatan pencarian, seleksi, dan pengorganisasian sumber pustaka yang relevan dengan fokus penelitian, baik melalui database jurnal nasional

(SINTA, Garuda, DOAJ) maupun sumber akademik terpercaya lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis historis-deskriptif. Tahapan analisis meliputi:

- a. Reduksi data, yaitu pemilihan informasi yang relevan dengan fokus penelitian (kebijakan pendidikan dan kualitas pembelajaran dasar).
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data berdasarkan periode sejarah kebijakan (masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan era Merdeka Belajar).
- c. Interpretasi, yaitu penafsiran terhadap hubungan antara arah kebijakan dan dampaknya terhadap kualitas pembelajaran di sekolah dasar.
- d. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan-temuan utama yang menggambarkan pola perubahan kebijakan pendidikan nasional dan tantangannya di masa kini.

5. Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas temuan, peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan

membandingkan berbagai literatur dan dokumen kebijakan dari periode yang berbeda. Selain itu, kritik sumber dilakukan untuk memastikan keaslian, keakuratan, dan kredibilitas data yang digunakan. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan reflektif mengenai dinamika historis kebijakan pendidikan nasional Indonesia serta relevansinya dengan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dasar.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Masa Kolonial (Sebelum 1945): Pendidikan sebagai Alat Kekuasaan

Kebijakan pendidikan pada masa kolonial Belanda pada dasarnya tidak dirancang untuk mencerdaskan rakyat Indonesia, melainkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan kolonial. Pendidikan hanya diberikan kepada kalangan tertentu, terutama anak-anak priyayi dan pegawai pemerintah kolonial. Lembaga pendidikan seperti Hollandsch-Inlandsche School (HIS), Europese Lagere School (ELS), dan Hollandsch-Chineesche School (HCS) menjadi simbol ketimpangan akses

pendidikan (Lallo, Muh. Yunus, Husain AS, 2021). Pendidikan pada masa ini lebih menekankan pada kemampuan baca-tulis dasar, kedisiplinan, dan loyalitas terhadap pemerintahan kolonial. Akibatnya, sebagian besar masyarakat pribumi tetap buta huruf dan tidak memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar.

Meski demikian, muncul pula lembaga pendidikan alternatif seperti Taman Siswa (1922) oleh Ki Hadjar Dewantara dan Muhammadiyah (1912) oleh KH Ahmad Dahlan yang menandai kesadaran nasional terhadap pentingnya pendidikan bagi rakyat. Gerakan pendidikan nasional inilah yang kelak menjadi cikal bakal sistem pendidikan nasional pasca-kemerdekaan.

2. Masa Orde Lama (1945–1965): Pendidikan untuk Pembentukan Bangsa

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar untuk membangun sistem pendidikan nasional yang merdeka dari pengaruh kolonial. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila dan memiliki semangat kebangsaan.

Kurikulum yang diberlakukan pada masa ini antara lain Rencana Pelajaran Terurai 1947, Rencana Pelajaran Terpadu 1952, dan Kurikulum 1964. Arah kebijakan pendidikan lebih menekankan pada penguatan moral, semangat gotong royong, dan pembentukan watak nasional.

Namun keterbatasan tenaga pendidik, sarana prasarana, serta instabilitas politik menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum maksimal. Di sekolah dasar, pembelajaran masih bersifat tradisional dan berpusat pada guru. Upaya pemerataan pendidikan pun masih menghadapi banyak hambatan karena belum adanya sistem pendanaan yang memadai.

3. Masa Orde Baru (1966–1998):

Sentralisasi dan Pembangunan

Pemerintahan Orde Baru memandang pendidikan sebagai sarana penting untuk mendukung stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Kebijakan pendidikan menjadi sangat sentralistik, di mana segala keputusan, kurikulum, dan kebijakan diatur oleh pemerintah pusat.

Kurikulum yang diterapkan pada periode ini antara lain Kurikulum

1968, 1975, 1984, dan 1994. Perubahan kurikulum selalu dikaitkan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional. Pada tahun 1984, pemerintah mencanangkan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 Tahun, yang kemudian diperluas menjadi 9 tahun di akhir masa Orde Baru.

Kebijakan ini berhasil meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar secara signifikan. Namun, kualitas pembelajaran sering dikritik karena terlalu menekankan pada hafalan dan target kognitif semata. Guru diposisikan sebagai pelaksana kebijakan tanpa ruang inovasi.

Dalam konteks historis, periode ini memperlihatkan kontradiksi antara pemerataan akses dan peningkatan mutu. Akses meningkat, tetapi inovasi pedagogis dan otonomi sekolah terhambat akibat sistem pendidikan yang sangat birokratis.

4. Masa Reformasi (1998–2018):

Desentralisasi dan Otonomi Pendidikan

Perubahan besar terjadi setelah runtuhnya Orde Baru. Semangat reformasi mendorong lahirnya kebijakan desentralisasi pendidikan, sebagaimana tertuang dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Desentralisasi memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah dan satuan pendidikan dalam pengelolaan pembelajaran, penganggaran, serta penilaian. Hal ini juga melahirkan paradigma baru dalam tata kelola sekolah melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan pemberdayaan masyarakat melalui Komite Sekolah.

Pada tataran kurikulum, pemerintah memperkenalkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, yang kemudian disempurnakan menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 dan Kurikulum 2013 (K-13) (Mukni'ah, 2019).

Kebijakan ini berupaya menggeser pembelajaran dari yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa, serta menekankan penguatan kompetensi abad ke-21. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan juga menimbulkan tantangan baru, seperti kesenjangan antar daerah,

ketimpangan kualitas guru, dan lemahnya kapasitas manajemen sekolah.

Secara umum, kebijakan pendidikan masa reformasi menandai pergeseran paradigma dari kontrol sentral ke partisipasi lokal, meskipun implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan mutu pembelajaran dasar.

5. Era Merdeka Belajar (2019–Sekarang): Otonomi dan Inovasi Pembelajaran

Kebijakan Merdeka Belajar yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sejak tahun 2019 menjadi tonggak baru reformasi pendidikan nasional. Tujuan utama kebijakan ini adalah menciptakan ekosistem pendidikan yang fleksibel, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Melalui program Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, Platform Merdeka Mengajar, dan Program Sekolah Penggerak, pemerintah berupaya memperkuat otonomi guru dan sekolah dalam merancang pembelajaran yang kontekstual.

Pendekatan ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan lama, seperti pembelajaran yang

terlalu kaku, ketergantungan pada kurikulum tunggal, serta keterbatasan ruang inovasi di sekolah dasar.

Namun, penelitian-penelitian terbaru (Syavitri et al., 2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar menghadapi tantangan serius, terutama pada aspek kesiapan sumber daya manusia, kesenjangan digital antar wilayah, serta rendahnya literasi teknologi di kalangan guru sekolah dasar.

Dengan demikian, meskipun kebijakan ini membawa semangat baru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan ekosistem pendidikan secara keseluruhan.

6. Pola Umum dan Implikasi terhadap Pembelajaran Dasar

Analisis terhadap seluruh periode sejarah kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa arah kebijakan selalu mencerminkan respon terhadap perubahan sosial-politik nasional dan tuntutan zaman.

- a. Pada masa kolonial, pendidikan menjadi instrumen kekuasaan.
- b. Pada masa Orde Lama, pendidikan menjadi alat pembentukan karakter bangsa.

- c. Pada masa Orde Baru, pendidikan dijadikan sarana pembangunan ekonomi dan stabilitas politik.

- d. Pada masa Reformasi, pendidikan menjadi arena partisipasi dan otonomi.

- e. Pada era Merdeka Belajar, pendidikan diarahkan untuk membangun kreativitas dan kemandirian siswa.

Menurut (Mukhammad & Fatoni, 2024), pola umum yang muncul adalah ketidakseimbangan antara perubahan kebijakan dan kesiapan implementasi di lapangan. Reformasi kebijakan sering kali berjalan lebih cepat dibanding peningkatan kapasitas guru, infrastruktur, dan budaya belajar di sekolah dasar.

Implikasinya, pembelajaran di tingkat dasar masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan mutu, inovasi pedagogis, dan relevansi antara kebijakan pusat dengan kebutuhan nyata peserta didik di daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa dinamika kebijakan pendidikan nasional Indonesia mencerminkan upaya berkelanjutan dalam menyeimbangkan antara pemerataan akses dan peningkatan mutu

pembelajaran dasar, namun keberhasilan sejati masih memerlukan sinkronisasi antara kebijakan, kapasitas guru, dan kebutuhan peserta didik.

Pembahasan

1. Dinamika Sejarah Kebijakan Pendidikan Nasional: Cermin Perubahan Paradigma

Perjalanan kebijakan pendidikan nasional di Indonesia menunjukkan adanya hubungan yang erat antara dinamika politik dan arah kebijakan pendidikan. Sejak masa kolonial hingga era Merdeka Belajar, kebijakan pendidikan selalu merefleksikan kondisi sosial-politik yang sedang dominan.

Pada masa kolonial, pendidikan berorientasi pada kepentingan kekuasaan, di mana rakyat pribumi tidak diberi kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Namun, kesadaran bangsa terhadap pentingnya pendidikan mulai tumbuh melalui gerakan nasional seperti Taman Siswa dan Muhammadiyah (Hubarat, 2017).

Pasca-kemerdekaan, kebijakan pendidikan bergeser menjadi instrumen pembentukan identitas nasional dan karakter bangsa. Pendidikan tidak lagi sekadar alat

administratif, tetapi menjadi wadah untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan.

Pergantian rezim ke Orde Baru membawa perubahan paradigma pendidikan menjadi alat pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Pendidikan ditempatkan dalam sistem yang sentralistik, di mana peran sekolah dan guru sangat terbatas. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan tidak pernah netral, tetapi selalu mengikuti arah ideologi dan kepentingan politik pemerintah yang berkuasa.

2. Dari Sentralisasi ke Otonomi: Pergeseran Pola Tata Kelola Pendidikan

Salah satu temuan penting dari analisis historis adalah adanya pergeseran besar dari pola sentralistik menuju desentralistik dalam tata kelola pendidikan. Pada masa Orde Baru, semua kebijakan dikendalikan oleh pemerintah pusat, mulai dari kurikulum, pembiayaan, hingga pengawasan.

Namun, memasuki era Reformasi, lahir kebijakan desentralisasi melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah

dan sekolah. Kebijakan ini kemudian memunculkan paradigma Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan partisipasi masyarakat melalui Komite Sekolah.

Perubahan ini merupakan kemajuan penting karena memberikan ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal. Namun, otonomi juga menghadirkan tantangan baru. Tidak semua daerah memiliki kemampuan yang sama dalam mengelola pendidikan. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara sekolah-sekolah di perkotaan dan pedesaan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa desentralisasi bukan hanya soal pelimpahan wewenang, tetapi juga menuntut kesiapan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di daerah (Dahyanti et al., 2025). Tanpa kesiapan itu, kebijakan otonomi justru bisa memperlebar kesenjangan mutu antarwilayah.

3. Pola Perubahan Kurikulum: Antara Inovasi dan Ketidakkonsistenan

Sejarah kebijakan pendidikan di Indonesia juga menunjukkan pola perubahan kurikulum yang sangat sering, yang mencerminkan keinginan pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pendidikan. Mulai dari

Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka, setiap perubahan kurikulum membawa visi baru yang dianggap lebih relevan dengan kebutuhan zaman.

Namun, perubahan yang terlalu sering tanpa evaluasi mendalam justru menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana, terutama di sekolah dasar. Guru harus terus beradaptasi dengan format, pendekatan, dan penilaian yang berbeda, sementara pelatihan dan pendampingan tidak selalu berjalan optimal. Kurikulum 2013 misalnya, menekankan pembelajaran berbasis kompetensi dan karakter, tetapi banyak guru SD kesulitan menerapkannya karena keterbatasan sumber daya dan beban administrasi.

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tidak akan efektif tanpa kesiapan implementatif di lapangan. Menurut (Muhamad Hasby Ashidiqi, Ubaid Ridlo, 2024) Kurikulum yang baik membutuhkan dukungan sistemik: pelatihan guru, sarana pembelajaran, serta monitoring berkelanjutan. Era Merdeka Belajar mencoba memperbaiki kondisi ini dengan memberikan fleksibilitas dan ruang inovasi, tetapi implementasinya

masih menghadapi hambatan terutama di daerah yang tertinggal.

4. Implikasi Historis terhadap Kualitas Pembelajaran di Sekolah Dasar

Kualitas pembelajaran di sekolah dasar merupakan cerminan dari efektivitas kebijakan pendidikan yang dijalankan. Dari hasil historis, tampak bahwa peningkatan akses pendidikan sudah berhasil dicapai sejak masa Orde Baru hingga kini. Namun, peningkatan mutu pembelajaran masih menjadi persoalan utama (Tintingon et al., 2023).

Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain: Kesenjangan kompetensi guru antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Kurangnya kesinambungan antar kebijakan yang membuat implementasi di lapangan tidak stabil. Ketergantungan pada pendekatan top-down, sehingga guru kurang memiliki ruang untuk berinovasi.

Dalam konteks historis, setiap kebijakan selalu membawa harapan untuk memperbaiki mutu pendidikan, namun sering kali terbentur pada persoalan klasik implementasi.

Tantangan ini menjadi semakin kompleks di era digital, di mana pembelajaran membutuhkan adaptasi terhadap teknologi dan metode baru. Era Merdeka Belajar menawarkan pendekatan baru melalui fleksibilitas kurikulum, asesmen formatif, dan kebebasan inovasi guru. Namun, bila dilihat dari perspektif sejarah, keberhasilan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh sejauh mana pembuat kebijakan belajar dari pengalaman masa lalu bahwa perubahan yang berkelanjutan membutuhkan dukungan sistemik dan konsistensi implementasi.

5. Relevansi Historis bagi Arah Kebijakan Pendidikan Masa Depan

Analisis historis menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan nasional selalu mengalami siklus pembaharuan yang mencerminkan perubahan paradigma tentang hakikat belajar. Pada masa kolonial, pendidikan bersifat elitis; pada Orde Lama bersifat ideologis; pada Orde Baru bersifat teknokratis; pada Reformasi bersifat partisipatif; dan pada era Merdeka Belajar bersifat humanistik serta fleksibel (Artino Nanda Bagus Setiawan & Binti Maunah, 2024).

Pola ini memperlihatkan bahwa sistem pendidikan Indonesia terus berupaya

mencari keseimbangan antara pemerataan akses, relevansi isi, dan kualitas pembelajaran. Namun menurut (Amri et al., 2021) untuk menghadapi tantangan abad ke-21, kebijakan pendidikan masa depan perlu menitikberatkan pada tiga hal utama: Penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru sebagai aktor utama pembelajaran. Konsistensi kebijakan dan kesinambungan program agar tidak terus berubah setiap pergantian pemerintahan.

Inovasi berbasis kearifan lokal agar kebijakan tidak hanya adaptif terhadap globalisasi, tetapi juga relevan dengan konteks Indonesia yang beragam. Relevansi historis ini penting karena menunjukkan bahwa setiap kebijakan masa kini harus dipahami sebagai hasil dari proses panjang pembelajaran institusional. Sejarah tidak hanya menjadi catatan masa lalu, tetapi juga sumber refleksi untuk memperbaiki masa depan pendidikan Indonesia.

6. Sintesis Pembahasan

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan nasional di Indonesia merupakan hasil dari proses historis yang panjang, kompleks, dan penuh dinamika.

Setiap perubahan kebijakan membawa implikasi langsung terhadap kualitas pembelajaran di sekolah dasar.

Namun, persoalan utama yang belum terpecahkan hingga kini adalah bagaimana menjembatani jarak antara idealisme kebijakan dan realitas implementasi di lapangan (Asrulla et al., 2025). Oleh karena itu, arah kebijakan pendidikan ke depan perlu berbasis refleksi historis belajar dari keberhasilan masa lalu sekaligus memperbaiki kelemahannya agar tujuan peningkatan mutu pendidikan benar-benar terwujud secara merata di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, hasil pembahasan ini menegaskan bahwa keberlanjutan dan efektivitas kebijakan pendidikan nasional sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menyeimbangkan antara inovasi kebijakan dan kesiapan sistem pembelajaran di tingkat dasar. Sejarah kebijakan pendidikan Indonesia menjadi cermin bahwa peningkatan mutu tidak dapat dicapai semata melalui perubahan kurikulum, melainkan melalui transformasi budaya belajar yang berkelanjutan.

E. Kesimpulan

Perjalanan kebijakan pendidikan nasional Indonesia menunjukkan bahwa perubahan arah kebijakan dari masa kolonial hingga era Merdeka Belajar selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melingkupinya. Setiap periode menghadirkan orientasi berbeda dari pendidikan elitis kolonial, nasionalistik pada Orde Lama, pembangunan sentralistik di masa Orde Baru, hingga desentralisasi dan otonomi pendidikan di era Reformasi. Transformasi kebijakan tersebut membawa kemajuan dalam pemerataan akses dan inovasi kurikulum, namun peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dasar masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan mutu, kompetensi guru, serta konsistensi implementasi kebijakan di lapangan. Refleksi historis menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari dinamika masyarakat dan tuntutan zaman. Oleh karena itu, arah kebijakan masa depan perlu berlandaskan pembelajaran dari sejarah untuk memperkuat relevansi dan keberlanjutan sistem pendidikan dasar. Penguatan profesionalisme guru, konsistensi kebijakan antarperiode, serta dukungan sistemik terhadap inovasi pembelajaran

menjadi kunci dalam mewujudkan kualitas pendidikan dasar yang merata, adaptif, dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, U., Rifma, R., & Syahril, S. (2021). Konsistensi Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2200–2205. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.778>
- Artino Nanda Bagus Setiawan, & Binti Maunah. (2024). History Sistem Pendidikan Nasional. *Edudikara: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 8(2), 51–63. <https://doi.org/10.32585/edudikara.v8i2.328>
- Asrulla, Rosadi, K. I., Jeka, F., Saksitha, D. A., & Wahyuni, D. (2025). Kontribusi Aspek Sosial Dan Budaya Dalam Aplikasi Kebijakan Pendidikan Nasional Indonesia. *Jurnal JIPDAS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar)*, 5(1), 404–423. <https://doi.org/10.37081/jipdas.v5i1.2579>
- Dahyanti, N., Diastami, S. M., Humaira, A., & Darmansah, T. (2025). Analisis Kebijakan dalam Mengatasi Problematika Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 2, 87–100.
- Daud, Y. M. (2024). Perkembangan Kebijakan Pendidikan di Indonesia: A Systematic Literature Review [The Development of Education

- Policy in Indonesia: A Systematic Literature Review]. *Intelektualita*, 13(1), 115–131.
- Hubarat, B. A. (2017). KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA : EVALUASI TERHADAP RUMUSAN KEBIJAKAN KURIKULUM BIDANG PENDIDIKAN TINGGI Binsar A . Hutabarat. *Societas Dei*, 4(2), 127–146.
- Lallo, Muh. Yunus, Husain AS, E. (2021). Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar. 5(6), 6126–6133.
- Muhamad Hasby Ashidiqi, Ubaid Ridlo, M. (2024). KEBIJAKAN, TUJUAN DAN VISI MISI PENDIDIKAN NASIONAL DALAM UPAYA MEMAJUKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA. 2(3), 454–474.
- Mukhammad, & Fatoni. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Dasar Dan Menengah. *Ta'Limuna : Jurnal Pendidikan* , 2(1), 73–81.
- Mukni'ah, M. (2019). Analisis Tentang Penerapan Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak. *Jurnal Tarbiyatuna*, 10(2), 137–146. <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v10i2.2696>
- Nasution, S. (n.d.). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Nur Fauziah, N., Nazilatul Husna, L., Hidayat, R., Madrasah Ibtidaiyah, G., & Achmad Siddiq Jember, U. K. (n.d.). ANALISIS IMPLEMENTASI PROYEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA DAN PROFIL PELAJAR RAHMATAN LIL`ALAMIN PADA KMA NO. 347 TAHUN 2022.
- Rifa'i, M. (2011). *Sejarah Pendidikan Nasional: dari masa klasik hingga modern*. Ar-Ruzz Media. https://books.google.co.id/books/about/Sejarah_pendidikan_nasional.html?id=l2ohKQEACAAJ&redir_esc=y
- Suyana, N., Dalmeri, D., Sugiharto, S., & Jupriadi, J. (2024). Kebijakan Pendidikan Nasional Menghadapi Tantangan Global Sebuah Analisis Strategis dan Prioritas. *Journal of Education Research*, 5(1), 620–634. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.888>
- Syavitri, I., Nst, M. R. S., Kholizah, N. A., & Siregar, N. K. (2024). 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Implementasi Kebijakan Pendidikan di Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin. 2(11), 903–909.
- Tawa, A. B. (2019). Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar. *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 4(2), 107–117. <https://doi.org/10.53544/sapa.v4i2.82>
- Tintingon, J. Y., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 798–809. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.5088>